

## Program Pengembangan Bum Desa Di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri

Ratna Dewi Mulyaningtiyas<sup>1</sup>, Sonny SM Laksono<sup>2</sup>, Rahmat Kanafi<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Dosen Magister Agribisnis, Pascasarjana, Univeritas Islam Kediri, Kediri

<sup>2</sup>Dosen Magister Manajemen, Pascasarjana, Univeritas Islam Kediri, Kediri

<sup>3</sup>Mahasiswa Magister Agribisnis, Pascasarjana, Univeritas Islam Kediri, Kediri

Jl. Sersan Suharmaji No. 38 Kediri. Indonesia 64128

Email: ratna\_dm@yahoo.com

### Abstrak

Pembangunan dan pengembangan wilayah keberadaan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Perkembangan suatu wilayah hanya dapat terwujud jika didukung oleh tersedianya infrastruktur secara memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan upaya pengembangan BUM Desa di Kecamatan Tarokan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tempat penelitian ada di lima kecamatan Tarokan, waktu penelitian Bulan Agustus sampai September tahun 2023. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Hasil Penelitian ini bahwa BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUM Desa sebagai instrumen modal sosial yang diharapkan menjadi jembatan yang menghubungkan desa dengan lingkup perekonomian di luarnya sehingga menjadi penguat ekonomi di pedesaan. Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan

**Kata Kunci:** BUM Desa, lembaga Komersial, lembaga Sosial

### Abstract

*Development and regional development of infrastructure is a very important factor. The development of a region can only be realized if it is supported by the availability of adequate infrastructure. This research aims to describe efforts to develop Village BUM in Tarokan District. This research uses qualitative research methods. The research locations were in five Tarokan sub-districts, the research time was August to September 2023. There were 10 informants in this research. The results of this research show that BUM Desa is a pillar of economic activity in the village, which functions as a social institution and a commercial institution. BUMDes as a social institution supports the interests of the community through its contribution in providing social services. Meanwhile, as a commercial institution, its aim is to seek profits by offering local resources (goods and services) to the market. BUM Desa is a social capital instrument which is expected to become a bridge that connects villages with the economic sphere outside it so that it becomes an economic amplifier in rural areas. To achieve this condition, strategic and tactical steps are needed to integrate potential, market needs, and the design of the institution into a plan*

*Keywords:* Village BUM, Commercial institutions, Social institutions

### Latar Belakang Teoritis

Penerapan otonomi daerah –yang di dalamnya mencakup penerapan otonomi desa pada dasarnya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu tercapainya kesejahteraan masyarakat yang hanya dapat direalisasikan melalui pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perspektif ini, pembangunan di daerah tidak hanya diselenggarakan untuk mencapai tujuan

regional dan sektoral yang bersifat parsial, melainkan diselenggarakan untuk memenuhi tujuan pembangunan wilayah secara komprehensif dan holistik. Pembangunan dan pengembangan wilayah dilakukan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumberdaya, serta keterpaduan antar sektor pembangunan.

Pembangunan dan pengembangan wilayah keberadaan infrastruktur merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Perkembangan suatu wilayah hanya dapat

terwujud jika didukung oleh tersedianya infrastruktur secara memadai. Semakin baik keberadaan infrastruktur, maka akan semakin baik pula dampaknya terhadap interaksi sosial ekonomi suatu wilayah yang pada gilirannya akan memacu perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi serta merupakan syarat agar perekonomian berjalan dengan baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan regional dan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah maupun negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, energi, dan sanitasi. Menurut Kuznets (2009), pembangunan infrastruktur merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi.

Infrastruktur transportasi, pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara berupa bandar udara (bandara) menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan transportasi udara, terutama untuk angkutan orang maupun angkutan barang dan jasa. Menurut publikasi Chang (2010) dalam *"The Development of Regional Airports in Asia"*, Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengalami peningkatan jumlah penumpang transportasi udara yang cukup drastis. Dengan meningkatnya jumlah penumpang transportasi udara, maka dilakukan pembangunan dan pengembangan bandara untuk memenuhi kebutuhan angkutan penumpang.

Rencana pembangunan bandara di Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014, menjadi salah satu program yang diprioritaskan di koridor ekonomi Pulau Jawa. Pada saat itu, Pemerintah (Pusat) melalui Kementerian Perhubungan telah menyetujui rencana

pembangunan bandara baru di Provinsi Jawa Timur, dengan menasar potensi jalur udara di Selatan Pulau Jawa dengan mengembangkan bandara-bandara yang ada di jalur Selatan karena selama ini konektivitas jalur udara masih terpusat di wilayah Utara Pulau Jawa.

Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 48 Tahun 2002 tentang Kebandarudaraan, telah melakukan studi kelayakan yang meliputi kelayakan ekonomi, kelayakan teknis, kelayakan operasional, kelayakan lingkungan, serta kelayakan dari segi usaha angkutan udara. Dari hasil studi kelayakan yang dilakukan pemerintah tersebut, terpilih lah 2 (dua) lokasi alternatif untuk pembangunan bandara, yakni: (1) Kabupaten Tulungagung di Kecamatan Campurdarat; dan (2) Kabupaten Kediri di Kecamatan Tarokan dan sekitarnya.

Dalam rangka usaha optimalisasi konektivitas transportasi dan didukung oleh rencana pembangunan infrastruktur di wilayah Selatan Jawa, maka pemerintah memilih menyetujui rencana pembangunan bandara di Kabupaten Kediri yang berlokasi di Kecamatan Tarokan dan sekitarnya. Pemilihan pembangunan bandara di Kabupaten Kediri oleh pemerintah tersebut karena dinilai lebih siap, dalam hal ini yang dimaksud adalah kesiapan penyediaan lahan dan lingkungan, serta kesiapan penyediaan anggaran.

Menurut Direktur Utama PT Angkasa Pura I, Faik Fahmi, pembangunan bandara yang sementara ini disebut Bandara Dhoho Kediri ini sangat potensial karena dapat menjadi alternatif penerbangan setelah Bandara Juanda Surabaya. Bahkan menurutnya, seiring dengan perkembangan dan potensi tersebut, Bandara Dhoho Kediri ini dapat menjadi alternatif bandara yang akan menjadi gerbang kedua di wilayah Jawa Timur, terutama dapat membuka area pelayanan penumpang ke wilayah Kabupaten Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Nganjuk, Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Ngawi, dan lain-lain. Di samping itu, Bandara Dhoho Kediri dapat dikembangkan menjadi pusat kargo udara di wilayah Barat Provinsi Jawa

Timur dan wilayah-wilayah sekitarnya ([www.kontan.co.id](http://www.kontan.co.id)).

Menurut Dikun dalam Andriyani (2011), adanya suatu bandara memiliki pengaruh atau dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, perkembangan suatu wilayah terutama kawasan di sekitar bandara memiliki pertumbuhan yang relatif berkembang lebih cepat dibandingkan dengan wilayah lain. Pengembangan Bandara Dhoho Kediri ke depan akan sangat mendukung percepatan pengembangan wilayah sekitarnya, khususnya Selingkar Wilis –termasuk Kecamatan Tarokan –sebagai salah satu dari tiga Proyek Strategis Nasional (PSN) di Jawa Timur.

Pengembangan Bandara Dhoho Kediri ke depan sangat potensial dikembangkan dengan model campuran atau kolaborasi antara lingkungan alam yang eksotis –lereng Gunung Wilis dengan konsep *airport city*. Konsep "*airport city*" telah efektif diadopsi oleh banyak bandara terbaik di dunia, seperti *Schipol Airport* di Belanda; *Worth Airport* di Dallas USA; *Pinnacle Airport* di Detroit USA; *Viracopos Airport* di Campinas, Brazil; *Hongkong International Airport* di Hongkong; *Subic Bay Airport* di Philippina; dan *Incheon International Airport* di Korea Selatan (Adisasmita, dkk, 2016).

Konsep *airport city* ini pada dasarnya merupakan konsep pengembangan bandara yang terpadu dengan pengembangan kawasan di sekitarnya dan meningkatkan standar pelayanan yang dapat meningkatkan pendapatan operator bandara (Kasarda, 2008). Melihat areal Bandara Dhoho Kediri yang dipersiapkan oleh PT Gudang Garam Tbk sekitar 500 ha, ke depan pengembangannya akan mengarah kepada konsep *airport city*. Menurut Kasarda (2008), konsep *airport city* merupakan inti dari terbentuknya *aerotropolis*, sebuah kota mandiri baru yang berkembang di sekitar bandara-bandara besar di dunia.

Keberadaan dan pengembangan Bandara Dhoho Kediri ini akan memberikan dampak terhadap perubahan dalam aspek ekonomi. Perubahan yang terjadi akan memberikan perkembangan terhadap sektor-sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa, industri, serta kegiatan ekonomi lainnya. Menurut Adisasmita (2012), perkembangan tersebut akan diikuti oleh peningkatan

kegiatan produktif dalam sektor-sektor primer (pertanian), sekunder (industri), dan tersier atau jasa (perdagangan, perbankan, perhotelan, dan lainnya). Seperti dikatakan oleh Kenneth Button (2010), keberadaan bandara akan memberikan manfaat terhadap perkembangan ekonomi lokal, dalam hal ini khususnya di Kecamatan Tarokan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yasmin Fida Az-Zahra (2019) terhadap dampak sosial ekonomi pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY, menyimpulkan dampak positif yang ditimbulkan akibat adanya pembangunan bandara adalah sebagian masyarakat yang membuka usaha mampu memberikan peluang kerja bagi orang lain. Hasil penelitian Happy Susanto (2020) terhadap obyek yang sama juga menyimpulkan bahwa di Kecamatan Temon Kabupaten Kulonprogo, DIY, mulai marak berkembangnya usaha seperti rumah kontrakan, kos-kosan, warung-warung makan, warung-warung, usaha kerajinan *handicraft* atau *souvenir*, dan lain-lain.

Dengan dibangun dan akan beroperasinya Bandara Dhoho Kediri tahun 2024, mobilitas orang, barang dan jasa ke wilayah Kecamatan Tarokan, terutama dari dan ke bandara meningkat secara signifikan. Kebutuhan akan pelayanan barang –produk-produk konsumsi sehari-hari –dan jasa juga akan meningkat. Sebagaimana halnya kasus pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYI) di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulonprogo, DIY, seperti hasil penelitian Az-Zahra (2019) dan Susanto (2020), maka di Kabupaten Kediri umumnya dan Kecamatan Tarokan khususnya akan tumbuh dan berkembang bidang-bidang usaha baru di berbagai sektor perekonomian.

Dampak positif ekonomi pembangunan –konstruksi –serta pengembangan Bandara Dhoho Kediri tersebut perlu dimanfaatkan oleh para pelaku usaha ekonomi, khususnya di Kecamatan Tarokan untuk mengembangkan usaha di berbagai sektor perekonomian seperti perdagangan, perindustrian, transportasi, pariwisata, dan lain-lain. Salah satu pelaku ekonomi yang potensial memanfaatkannya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), yang keberadaannya di beberapa desa selama

ini sudah terbukti berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat desa.

Konteks pembangunan sampai beroperasinya Bandara Dhoho Kediri, jika BUM Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tarokan tidak atau kurang mampu memenuhi tuntutan kebutuhan layanan produk-produk usaha barang dan jasa yang akan semakin luas, beragam dan kompleks, maka sumberdaya ekonomi atau investasi dari luar wilayah Kecamatan Tarokan akan mengalir masuk. Selain akan merugikan secara ekonomi bagi warga masyarakat setempat, juga berpotensi menimbulkan konflik sosial horizontal di Kecamatan Tarokan.

### Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif yaitu untuk meneliti obyek alamiah, sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data, dilakukan secara purposive (Iskandar, 2009:11). Penelitian Kualitatif merupakan pendekatan penelitian dengan cara menggali lebih dalam mengenai permasalahan yang ada dengan cara mengajukan pertanyaan mengenai permasalahan yang ada kemudian mengumpulkan jawabannya menjadi data untuk di lakukan penelitian lebih lanjut (Creswell, 2019). Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah (Walidin, et al, 2015). Menurut Sugiyono (2017) penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme ataupun enterpretatif, dipergunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah. Penelitian ini di laksanakan pada bulan April sampai Agustus 2023 di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (*purposive*), dengan pertimbangan dasar bahwa BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa, yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan lembaga komersial (*commercial institution*).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung melalui Studi kepustakaan (*library research*), wawancara, dokumentasi, serta observasi, *Focus Group Discussion* atau pengamatan langsung terhadap pelaksanaan BUM Desa di Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri oleh peneliti untuk tujuan atau proyek penelitian (Salkind, 2010). Informan dalam penelitian ini ada 10 orang. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelusuran berbagai dokumen tertulis Kecamatan Tarokan, BPS, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, BSN, buku literatur, dan internet. Data yang diperoleh dituangkan ke dalam sub-sub bab sehingga menjawab tujuan penelitian atau kajian. Wawancara adalah pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut. Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang informan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 2007). Dalam melakukan wawancara, peneliti menyiapkan instrumen kajian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis untuk diajukan, dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan, oleh karena itu jenis wawancara yang digunakan termasuk ke dalam jenis wawancara terstruktur.

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2000). Dalam penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif kualitatif, teknik menuturkan dan menafsirkan data yang ada tentang situasi dan kondisi yang dialami. Teknik analisis data dalam kajian ini ditempuh melalui langkah-langkah, Reduksi Data, Penyajian Data, dan Menarik kesimpulan.

### Hasil dan Pembahasan

Perkembangan BUM Desa di Indonesia belum berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Zulkarnain Ridlwan (2014), pendirian BUM Desa cenderung lebih sebagai paket instruksional yang datang dari Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten. Sementara pendirian badan usaha ini harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas, dan didukung oleh kebijakan daerah kabupaten yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan, di samping berbagai potensi yang mendukungnya juga terdapat terdapat berbagai potensi kendala, tantangan, dan hambatan yang harus dihadapi dalam pengembangannya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mayu dan Adlin (2016), mengungkapkan beberapa faktor yang dapat menghambat pengembangan dan pertumbuhan BUM Desa, di antaranya meliputi: (1) kurangnya pengetahuan administrator dalam memahami maksud dari kepemimpinan, manajerial, dan tata kelola organisasi bisnis; (2) Kurangnya menjalin hubungan perjanjian dengan pihak mana pun, serta kurangnya unit bisnis yang dimiliki; (3) kurang memiliki kekuatan yang dilahirkan dari semangat emansipasi lokal; (4) tidak adanya tradisi berdesa yang kuat karena kurangnya solidaritas, kerjasama, dan gotong royong antara warga desa; dan (5) tidak mendapat dukungan penuh dari supra Desa.

Sementara menurut Widiastuti dan Nurhayati (2019), faktor pendorong pengembangan desa di antaranya adalah banyaknya potensi yang dimiliki oleh desa seperti potensi ekonomi dan potensi lingkungan. Selain itu, daya dukung masyarakat desa dan pemerintah desa juga menjadi hal yang sangat penting untuk kemajuan desa. Sedangkan yang dapat menghambat perkembangan desa adalah, adanya konflik kepentingan antar anggota masyarakat dan pemerintah desa yang dapat mengakibatkan program-program pengembangan desa terbengkalai atau gagal (Widiastuti dan Nurhayati, 2019). Hasil penelitian yang dilakukan Hamda (2019) menjelaskan bahwa kondisi transportasi terutama sarana dan prasarannya, menjadi poin penting yang menjadi kekuatan dalam mendukung pengembangan BUM Desa. Sementara itu, yang dapat menjadi

penghambat pengembangan BUM Desa, adalah kurangnya sosialisasi di tengah masyarakat.

Selain itu menurut Kurniasih dkk. (2019), faktor penting dalam pengembangan BUM Desa yaitu penentuan jenis usahanya. Usaha yang ingin dikembangkan oleh BUM Desa harus dikaitkan dengan jenis usahanya. Alternatif pengembangan BUM Desa dapat dilakukan melalui Bank Desa. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Bank Desa dapat memberikan kontribusi yang cukup baik bagi Pendapatan Asli Desa (PADes). Selain itu Bank Desa dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Hal tersebut dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat sebagai nasabah Bank Desa.

Melalui Bank Desa masyarakat ternyata tidak saja dapat melakukan peminjaman, tetapi masyarakat juga diajarkan untuk menabung, karena sistem di Bank Desa mewajibkan nasabah untuk menabungkan sebagian kecil pinjamannya. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor utama yang menentukan keberhasilan pengembangan BUM Desa adalah: dukungan kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan juga kemampuan pengelolanya.

Agar pengembangan BUM Desa dapat efektif, terdapat beberapa prinsip umum pengelolaan yang harus dipenuhi, yakni:

1. Pengelolaan BUM Desa harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk mengembangkan BUM Desa diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya, dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan;
2. BUM Desa harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan pemerintah desa. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten,

- atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ketiga;
3. BUM Desa didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan di antaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk produksi terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek *ijon* (rente), dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUM Desa harus mampu mendidik masyarakat untuk membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri;
  4. Pengelolaan BUM Desa, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu. Disebarluaskan oleh sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUM Desa diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajibannya;
  5. Keberadaan BUM Desa dapat dikatakan efektif, jika: (1) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan Minimal) agar berkembang usaha masyarakat di desa; (2) memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan PADes; dan (3) meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi desa (Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUM Desa, Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKSDP), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007).

### Keimpulan

1. Perkembangan BUM Desa di Kecamatan Tarokan belum menunjukkan hasil yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu: meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes).
2. Upaya pengembangan BUM Desa di Kecamatan Tarokan perlu difokuskan terhadap aspek: status badan hukum dari BUM Desa; permodalan; jenis usaha; dan tata kelola atau manajemen;

### Saran

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri perlu segera menindaklanjuti Kebijakan Strategis dan Program Strategis yang telah diuraikan di atas, serta untuk selanjutnya dirumuskan menjadi program-program dan/atau kegiatan yang implementatif, baik oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kediri (melalui UPTD-nya) atau oleh pihak Pemerintah Desa dan/atau BUM Desa.

### Daftar Pustaka

- Adawiyah, Robiatul, 2018, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial: Studi pada BUMDes Surya Sejahtera, Desa Kedungturi, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya.
- Adi, Isbandia Rukminto, 2000, *Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas: Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Adisasmita, Rahardjo, 2006, *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Adisasmita, Rahardjo, 2013, *Pembangunan Pedesaan*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Aeni, Nurul, 2020, "Gambaran Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kabupaten Pati", *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume 18, Nomor 2, Desember 2020.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Agunggunanto, E. dkk, 2016, "Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)", *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, Vol. 13, No. 1, 2016, hal. 67-81.
- Alfiansyah, 2021, "Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, Vol. 5, No. 2, Maret 2021, hal. 212-219.
- Anwas, M. 2014, *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*, Bandung: Alfabeta.
- Arifah, Lia Kholilatul, 2019, "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Pekon Cipta Waras Kecamatan Gedung Surian Kabupaten Lampung Barat", *Skrripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri, 2019, *Kajian Evaluatif Terhadap Prioritas Penggunaan Dana Desa*, Kediri: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kediri.
- Bogdan, Robert C., and Knop Biklen, 1982, *Qualitative Research for Education*, London: Allyn & Bacon, Inc.
- Bryant, Corolie and Louise G. White, *Managing Development in The Third World*. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang, Penerjemah Riyanto, Jakarta: LP3ES.
- Chambers, R. 1988, *Rural Development Putting The Last First*. Pembangunan Desa: Mulai dari Belakang, penerjemah M. Dawam Rahardjo, Yogyakarta: LP3ES.
- Danaresa, W. Dan Herawati, N.R., 2018, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa Tirta Mandiri Ponggok Desa Ponggok Kabupaten Klaten Jawa Tengah", *Journal of Politic and Government Studies*, Vo. 7 No. 1, 2018, hal: 191-120.
- Dewi, A.S.K. 2010, "Alternatif Bentuk Badan Hukum yang Tepat dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)", *Pamator*, Voume 3, Nomor 2, Oktober 2010, hal. 114-121.
- Eko, Sutoro dkk, 2014, *Desa Membangun Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FFPD).
- Fanani, Zainal, 2018, "Analisis Faktor Kelembagaan, Kualitas SDM, Modan dan Strategi Pemasaran Terhadap Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif: Studi pada Desa Wisata Pujon Kidul, Kabupaten Malang", *Tesis*, Program Pasca Sarjana Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya.
- Gunawan, Yusuf, 2017, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Tlogoweru", *Disertasi*, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Salatiga: Satya Wacana University Press.
- Hamda, S.A. 2019, "Analisis Pengembangan Badan Usaha Milik (BUMNag) di Nagari Tabek Panjang, Kecamatan Baso", *Disertasi*, Universitas Andalas, Padang.
- Hendro, dan Chandra W.W., 2006, *Be a Smart and Good Entrepreneur*, Jakarta: Erlangga.
- Iskandar, 2009, *Metodologi Penelitian Kmayu,ualitatif*, Jakarta: Gaung Persada.
- Iyan, dkk., 2020, "Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Mulia di Desa Purwareja Kabupaten Lamandau", *Jurnal of Environment and Management*, 2020.

- Kartasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat*, Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Kurniasih, D. Dkk., 2019, “Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Strategi Pengembangan BUMDes di Kabupaten Banyumas, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, ( 2), 134-143.
- Kusnaedi, 1995, *Membangun Desa*, Jkarta: Swadaya.
- Kuznets, Simon. 1955, Economic Growth and Income Inequality, *The American Economic Review*, Volume XLV.
- Maryunani, 2008, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Mayu, WI dan Adlin, A. 2016, “Faktor-faktor yang Menghambat Tumbuh dan Berfkembangnya Badan Usaha Milik Desa di Desa Pematang Tebih Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Tokan Hulu Tahun 2014-2015” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu nSosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3 (2), 1-11.
- Migley, James, 1995, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Pembangunan, Penerjemah Fathrulsyah, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UIP.
- Moleong, Lexy J., 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto, 1996, *Ekonomi Rakyat dan Program IDT*, Yogyakarta: Aditya Media.
- Najiati, Sri; Agus Asmana; I Nyoman N. Suryadiputra, 2005, *Pemberdayaan Masyarakat di Laban Gambut*, Bogor: Wetland International.
- Nasdian, Tony Fredian, 2014, *Pengembangan Masyarakat*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu, 1987, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Jakarta: Bina Aksara.
- Nurman, 2015, *Strategi Pembangunan Daerah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Prawirokusumo, Soeharto, 2001, *Ekonomi Rakyat: Konsep, Kebijakan, dan Strategi*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Priyarsono, D.S. 2017, “Membangun dari Pinggiran: Tinjauan dari Perspektif Ilmu Ekonomi Regional”, *Journal of Regional and Rural Development Planning*, Vol. 1, No. 1, Februari 2017, hal. 42-52.
- Rangkuti, Freddy, 2015, *Analisis SWOT*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Ridlwani, Zulkarnaen, 2014, “Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa”, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 3, Juli-September 2014, hal. 424-439.
- Sari, Andriyani, 2017, “Pengaruh BUMDes Terhadap Pengembangan Ekonomi Desa: Studi Kasus di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Berdagai, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Soetjipto, Noer, 2015, *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Jawa Timur: Analisis Inferensial Kinerja Pengelola Badan Usaha Milik Desa*, Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumarti, Titik, dkk. 2008, *Model Pemberdayaan Petani dalam Menwujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera*, Bogor: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat IPB.
- Sumodiningrat, G. 1998, *Membangun Perekonomian Rakyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, dan Nurhadi, 2004, *Ekonomi untuk SMP Kelas VII*, Yogyakarta: Erlangga.
- Tama, D.O.E., dan Yanuardi, 2013, “Dampak Badan Usaha Milik desa (BUMDes) bagi Kesejahteraan Masyarakat di Desa Karangrejek Kecamatan



- Wonosari Kabupaten Gunungkidul”,  
*Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9), 1689-1699.
- Wulandari, N.S. 2018, “Efektivitas Peran Pendamping Desa Dalam Menjalankan Tugas Pendampingan Bagi Pemerintah Desa: Studi Kasus di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Yani, R.D.F 2017, “Urban Bias Sebagai Perangkat Keterbelakangan Pembangunan Desa”, *Geomedia*, Volume 15, Nomor 2, November 2017, hal. 193-204.
- Zed, Mestika, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.